

Analisis Implementasi Kebijakan dan Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya

Banu Atmoko¹, Budi Purwoko², Kaniati Amelia³, Amrozi Khamidi⁴

Universitas Negeri Surabaya^{1,2,3,4}

**24010845144@mhs.unesa.ac.id, budipurwoko@unesa.ac.id, kaniatiamalia@unesa.ac.id,
amrozikhamidi@unesa.ac.id**

Article History:

Accepted: 30 Februari 2025

Revised: 31 May 2025

Published: 29 July 2025

Abstract

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan agenda tahunan krusial dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Surabaya. Implementasinya seringkali memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang perlu dianalisis secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menganalisis implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya; (2) menelaah faktor-faktor penyebab permasalahan dalam PPDB; (3) mengevaluasi efektivitas kebijakan PPDB; (4) rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas implementasi PPDB di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan (Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan siswa), serta melalui analisis dokumen terkait kebijakan dan pelaksanaan PPDB. Penelitian ini telah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan sistem PPDB yang lebih adil, transparan, dan merata. Rekomendasi kebijakan yang diajukan diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menyempurnakan sistem PPDB dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan berkualitas.

Kata kunci: Kebijakan, Permasalahan, PPDB

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, terus berupaya untuk mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif bagi seluruh warganya. Chikulo, B. C. (2021) menyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di negara berkembang, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas administratif sangat penting, yang dapat dilakukan melalui pelatihan serta penguatan institusi pendidikan agar lebih siap dalam menjalankan kebijakan yang ada. Kedua, stabilisasi politik diperlukan dengan menciptakan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan tidak mudah berubah akibat pergantian

pemerintahan. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan harus ditingkatkan guna memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Terakhir, alokasi sumber daya yang cukup menjadi kunci untuk mendukung fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, kebijakan pendidikan di negara berkembang diharapkan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Tara & Ridwan(2023)penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan PPDB online di Kota Medan. Fokus penelitian mencakup komunikasi dan ketersediaan sumber daya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Salah satu tahapan krusial dalam siklus pendidikan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sebuah proses seleksi calon siswa untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Muammar (2019) menyatakan bahwa problematika dalam penerapan sistem zonasi pada PPDB di SD Kota Mataram, seperti terbatasnya sekolah favorit, ketimpangan kualitas pendidikan, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Putri,Ayunda(2022)menyatakan bahwa implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta, termasuk proses, aspek implementasi, serta input dan output peserta didik sebelum dan setelah adanya PPDB zonasi. Di Kota Surabaya, sebagai salah satu pusat metropolitan terbesar di Indonesia, isu terkait PPDB memiliki dinamika dan kompleksitas tersendiri yang perlu dicermati. Setiap tahunnya, pelaksanaan PPDB di Surabaya menjadi perhatian utama masyarakat, orang tua, dan pemerintah daerah.

Rahmawati, Aullia, Muflhatin(2018) penelitian ini mengkaji peran komunikasi dalam implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMP Kabupaten Kediri, dengan fokus pada efektivitas komunikasi antar pihak terkait. Hal ini tidak terlepas dari tingginya angka partisipasi pendidikan dan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan akses ke sekolah-sekolah berkualitas. Namun, dalam implementasinya, PPDB di Surabaya kerap kali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang adil dan merata. Salah satu isu sentral yang mewarnai PPDB di Surabaya adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan tempat di sekolah negeri, terutama pada sekolah-sekolah yang dianggap memiliki kualitas dan fasilitas yang lebih baik. Fenomena "sekolah favorit" ini menciptakan persaingan yang ketat antar calon siswa, yang terkadang memicu berbagai upaya dari orang tua untuk memastikan anaknya diterima di sekolah impian mereka. Implementasi sistem zonasi, yang bertujuan untuk pemerataan akses dan mendekatkan siswa dengan sekolah di lingkungan tempat tinggalnya, juga tidak luput dari berbagai tantangan di Surabaya.

Yasmin (2023)penelitiannya mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi, dampaknya, dan faktor yang menghambat maupun mendukung penerimaan peserta didik baru di SMA. Wijayanti & Nurjaman (2020) menyatakan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pemerataan pendidikan, serta tantangan dalam pelaksanaannya.

Meskipun memiliki tujuan mulia, penentuan batas zona yang kurang ideal, ketidaksesuaian dengan demografi, serta potensi manipulasi data kependudukan seperti praktik "numpang Kartu Keluarga" menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Orang tua terkadang merasa sistem ini membatasi pilihan mereka dan tidak selalu mengakomodasi kualitas pendidikan yang mereka harapkan. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB juga menjadi sorotan. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kuota, kriteria seleksi, mekanisme penilaian, dan proses verifikasi. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan kecurigaan dan potensi terjadinya praktik kecurangan atau penyimpangan yang merugikan calon siswa dan orang tua. Tujuan utama sistem zonasi adalah untuk menghapus diskriminasi berbasis kemampuan akademik awal, serta meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan akses sekolah bagi semua lapisan masyarakat (Handayani, 2021; Safarah & Wibowo, 2018).

Permasalahan teknis terkait sistem pendaftaran online juga menjadi perhatian. Meskipun Surabaya memiliki infrastruktur teknologi yang relatif maju, lonjakan pendaftar pada waktu-waktu tertentu dapat menyebabkan gangguan pada sistem. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama, sehingga proses pendaftaran online dapat menjadi kendala bagi sebagian orang tua. Lebih lanjut, isu-isu seperti persaingan dalam jalur prestasi dan potensi kecurangan dalam pengajuan sertifikat prestasi juga memerlukan perhatian serius. Pemerintah Kota Surabaya perlu memastikan mekanisme verifikasi yang ketat dan adil untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sehat. Memahami akar permasalahan PPDB di Kota Surabaya secara komprehensif menjadi krusial dalam merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang ada, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi secara optimal diharapkan dapat mewujudkan sistem PPDB yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk mengakses pendidikan berkualitas di Kota Pahlawan ini. Penelitian ini bertujuan 1)

Mendeskripsikan implementasi kebijakan PPDB di berbagai jenjang pendidikan di Kota Surabaya; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB di Kota Surabaya dari berbagai perspektif; (3) Menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan dalam pelaksanaan PPDB di Kota Surabaya; (4) Mengevaluasi efektivitas kebijakan PPDB dalam mewujudkan pemerataan akses dan keadilan pendidikan di Kota Surabaya; (5) Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem dan implementasi PPDB di Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk studi kebijakan, sebagai metode ilmiah (Creswell, 2013). Sesuai dengan tujuan penelitian, studi ini menggunakan sintesis penelitian kualitatif (meta-study) sebagai metodenya (Barnett & Thomas,

2009; Overton & Müller, 2013; Paterson et al., 2001). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti data statistik, rancangan kebijakan, dokumen kebijakan, publikasi, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di kota Surabaya. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci, dan observasi pelaksanaan PPDB di kota Surabaya. Proses analisis data dipandu oleh kerangka kerja Creswell (2013), yang menekankan pada pengorganisasian, pengurutan, pengodean, dan pengkategorian data secara sistematis untuk memperoleh temuan berdasarkan fokus atau masalah penelitian. Pendekatan ini mempermudah data kualitatif yang tersebar dan berjumlah besar menjadi lebih mudah dipahami. Uji keabsahan data; (a) Triangulasi sumber dan Teknik; (b) *Member check* dengan informan kunci; (c) Audit trail dari proses analisis dan interpretasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi PPDB di Kota Surabaya

Hasil penelitian ini mengungkapkan langkah yang kompleks terkait implementasi kebijakan dan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya. Temuan-temuan dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang dihadapi oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pendidikan, pihak sekolah, orang tua/wali, hingga calon peserta didik. Pembahasan berikut akan mengurai temuan-temuan tersebut dalam kerangka teori implementasi kebijakan publik dan konsep-konsep keadilan dalam pendidikan yang telah diulas sebelumnya. Implementasi kebijakan PPDB di Kota Surabaya, yang mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 serta peraturan daerah dan surat edaran Dinas Pendidikan setempat, menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi berbagai jalur penerimaan, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus dan seragam di seluruh jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK) maupun antar wilayah di Surabaya.

Kristyaningrum, Ardiansyah & Fadhilah (2019). Penelitian ini mengevaluasi program PPDB sistem zonasi di Kabupaten Brebes menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product), dengan fokus pada kendala dan rekomendasi perbaikan. Iqbal Faza Ahmad (2021) penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di SMP Negeri Kota Yogyakarta. Hasil menunjukkan bahwa implementasi sudah optimal dan efektif, dengan sebaran peserta didik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Ansar, Rahmawati, Wahid (2019) penelitian ini mengungkap implementasi manajemen PPDB berbasis online di SMK Negeri 6 Makassar melalui penerapan sistem PPDB online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini meningkatkan transparansi dan memudahkan verifikasi data. Darmawan, R., Bustomi, T., & Turmudzi, D. (2024) model implementasi kebijakan sistem zonasi yang diusulkan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan PPDB yang lebih adil

dan merata. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pemerataan akses pendidikan dasar.

Pada jalur domisili, yang memiliki kuota terbesar, teridentifikasi beberapa isu krusial. Pertama, ketidaksesuaian antara daya tampung sekolah dan sebaran penduduk menjadi sumber utama kekecewaan. Di beberapa wilayah padat penduduk dengan jumlah sekolah negeri yang terbatas, persaingan masuk melalui jalur domisili sangat ketat, bahkan untuk calon siswa yang tinggal sangat dekat dengan sekolah. Hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan, terutama bagi keluarga yang telah lama berdomisili di sekitar sekolah namun gagal diterima karena kalah dalam seleksi berdasarkan usia atau urutan pendaftaran. Temuan ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya di daerah lain yang juga menyoroti masalah serupa (misalnya, penelitian di Kota Padang dan Sleman). Kedua, penelitian menemukan adanya indikasi manipulasi Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili oleh sebagian kecil orang tua/wali yang berupaya mengakali sistem zonasi demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Meskipun Dinas Pendidikan telah berupaya melakukan verifikasi, celah untuk praktik curang masih ada, terutama pada tahap awal pendaftaran. Fenomena ini menggarisbawahi tantangan dalam memastikan keadilan prosedural dalam implementasi kebijakan. Ketiga, persepsi terhadap kualitas sekolah yang tidak merata di berbagai zona masih menjadi perhatian utama. Meskipun tujuan zonasi adalah untuk mengurangi label "sekolah favorit" dan mendorong pemerataan kualitas, orang tua/wali masih memiliki preferensi yang kuat terhadap sekolah-sekolah tertentu yang dianggap memiliki reputasi lebih baik. Hal ini menciptakan tekanan yang lebih besar pada persaingan di zona-zona yang memiliki sekolah-sekolah dengan citra unggul. Temuan ini relevan dengan konsep keadilan distributif, di mana kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas belum dirasakan setara oleh semua warga Surabaya. Implementasi jalur afirmasi, yang ditujukan untuk calon siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas, juga menunjukkan tantangan tersendiri.

Penelitian menemukan bahwa validitas data penerima bantuan sosial menjadi isu krusial. Dar, I. K., & Ernawati, E. (2023) menyimpulkan bahwa meskipun SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan telah melaksanakan kebijakan sistem zonasi dengan baik, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Peningkatan sosialisasi yang lebih intensif dan koordinasi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB di masa mendatang. Mekanisme verifikasi yang belum optimal berpotensi menyebabkan penyaluran kuota afirmasi yang tidak tepat sasaran. Selain itu, kuota afirmasi yang terbatas seringkali tidak dapat menampung seluruh calon siswa yang memenuhi kriteria, sehingga menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan dalam mewujudkan keadilan sosial. Pada jalur prestasi, penelitian menyoroti subjektivitas dalam penilaian prestasi non-akademik sebagai potensi masalah. Meskipun Dinas Pendidikan telah menetapkan pedoman, interpretasi dan bobot yang diberikan pada berbagai jenis prestasi dapat bervariasi antar sekolah. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang transparansi dan potensi bias dalam proses seleksi. Selain itu,

temuan juga mengindikasikan adanya potensi manipulasi sertifikat prestasi, meskipun belum terkonfirmasi secara luas. Terakhir, jalur mutasi, meskipun kuotanya relatif kecil, juga tidak luput dari sorotan.

Penelitian menemukan adanya interpretasi yang beragam terkait kriteria perpindahan tugas dan potensi penyalahgunaan jalur ini oleh pihak-pihak tertentu. Cynthia, Rina, Neny(2023) penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan zonasi pada SMP menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan zonasi di SMP Negeri Kota Semarang belum sepenuhnya efektif. Diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi, peningkatan sumber daya, penguatan disposisi pihak terkait, dan penyederhanaan struktur birokrasi untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuannya dalam pemerataan akses pendidikan. Dampak positif yang ditemukan meliputi meningkatnya keberagaman sosial di sekolah dan berkurangnya dominasi sekolah favorit, serta mendekatkan siswa dengan sekolah tempat tinggal (Perdana, 2019; Mulyadi, 2020).

Namun, berbagai kendala masih muncul, seperti ketimpangan kualitas antar sekolah, kurangnya kesiapan infrastruktur, data kependudukan yang tidak akurat, serta praktik manipulasi domisili (Makmur, 2023; Pangaribuan et al., 2019).Ketimpangan kualitas guru dan fasilitas membuat sistem zonasi belum sepenuhnya adil, karena siswa yang ditempatkan berdasarkan wilayah bisa jadi justru menerima pendidikan yang kurang bermutu dibandingkan siswa di wilayah lain (Handayani, 2021; Mulyadi, 2020).Rekomendasi dari berbagai penelitian umumnya menyarankan adanya evaluasi berkelanjutan, perbaikan distribusi sumber daya pendidikan, serta sosialisasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan sistem zonasi (Makmur, 2023; Safarah & Wibowo, 2018).

2. Faktor-faktor yang Berkontribusi Terhadap Permasalahan PPDB

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya merupakan hasil dari kombinasi antara persoalan struktural, kebijakan yang belum matang, dan pelaksanaan teknis di lapangan. Salah satu faktor utama adalah ketimpangan kualitas antar sekolah, terutama antara sekolah yang berada di pusat kota dengan yang di wilayah pinggiran. Hal ini menyebabkan masyarakat tetap berorientasi pada sekolah-sekolah favorit, meskipun sistem zonasi diterapkan. Ketimpangan ini sejalan dengan teori ketimpangan struktural dalam pendidikan yang dikemukakan oleh Bowles dan Gintis (1976), di mana sistem pendidikan secara tidak langsung mereproduksi ketidaksetaraan sosial melalui distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata. Selain itu, kebijakan PPDB yang terus mengalami perubahan dan kurangnya sosialisasi di tingkat sekolah dan masyarakat menambah kebingungan, sehingga pelaksanaannya tidak konsisten dan cenderung menimbulkan ketidakpuasan (Mulyadi, 2020).

Manipulasi data domisili juga menjadi isu krusial, di mana sebagian masyarakat memalsukan alamat tempat tinggal demi mengakses sekolah unggulan, yang mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan (Pangaribuan et al., 2019). Selain itu, keterbatasan infrastruktur di beberapa sekolah zonasi membuat pemerataan akses

pendidikan sulit terwujud secara nyata. Menurut UNESCO (2017), pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses fisik ke sekolah, tetapi juga jaminan kualitas yang setara. Terakhir, lemahnya pengawasan dan evaluasi kebijakan menjadi penyebab berulangnya masalah yang sama tiap tahun. Handayani (2021) menekankan pentingnya sistem evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan agar implementasi kebijakan berjalan efektif. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PPDB di Surabaya, diperlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural dan strategis dalam jangka panjang.

Analisis lebih lanjut mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap munculnya permasalahan dalam pelaksanaan PPDB di Kota Surabaya: (1) Desain kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif. Meskipun kebijakan PPDB nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, implementasinya di tingkat daerah, termasuk Surabaya, perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan karakteristik lokal, seperti kepadatan penduduk, sebaran sekolah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat; (2) Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan jumlah sekolah negeri berkualitas di beberapa wilayah tidak sebanding dengan jumlah lulusan dari jenjang sebelumnya, menciptakan persaingan yang inheren; (3) Kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa sosialisasi kebijakan PPDB kepada masyarakat, terutama terkait perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran, belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan potensi misinterpretasi; (4) Kelemahan dalam sistem verifikasi data. Proses verifikasi data calon peserta didik, terutama terkait domisili dan status ekonomi, perlu diperkuat untuk mencegah praktik kecurangan dan memastikan ketepatan sasaran; (5) Tekanan dari masyarakat dan politik lokal. Intervensi dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan politisi lokal, terkadang dapat memengaruhi proses implementasi PPDB; (6) Kurangnya Sistem Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Efektif. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait PPDB yang belum optimal dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem.

3. Efektivitas Kebijakan PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan dan Keadilan.

Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan PPDB saat ini dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan keadilan di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang beragam. Sistem zonasi telah berhasil meningkatkan akses bagi sebagian siswa yang tinggal di dekat sekolah, namun belum sepenuhnya mengatasi masalah disparitas kualitas antar sekolah. Jalur afirmasi telah memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas, namun kuota yang terbatas dan potensi ketidakakuratan data masih menjadi kendala. Jalur prestasi memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi, namun isu subjektivitas dan potensi manipulasi perlu diatasi.

Secara keseluruhan, kebijakan PPDB di Surabaya telah menunjukkan upaya ke arah pemerataan dan keadilan, namun implementasinya masih dihadapkan pada

berbagai tantangan struktural dan operasional. Tujuan ideal untuk memastikan setiap anak di Surabaya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi atau 1 wilayah tempat tinggal, belum sepenuhnya tercapai. Ari.I.M.(2018) menyatakan bahwa program PPDB sistem real time online di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tingkat pencapaian program mencapai 94,6%, dengan kualitas pelayanan panitia sebesar 93,9%.

Efektivitas kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam mewujudkan pemerataan akses dan keadilan pendidikan masih menjadi perdebatan, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk menghapus dikotomi sekolah favorit dan non-favorit serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri terdekat tanpa diskriminasi kemampuan akademik atau status sosial ekonomi. Namun dalam praktiknya, efektivitas kebijakan ini masih terbatas. Handayani (2021) menyatakan bahwa sistem zonasi PPDB belum sepenuhnya berhasil menciptakan keadilan, karena kualitas pendidikan di setiap sekolah belum merata, sehingga siswa yang ditempatkan di sekolah zonanya belum tentu memperoleh layanan pendidikan yang setara. Selain itu, ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya di beberapa sekolah menyebabkan ketimpangan baru dalam bentuk kualitas layanan pendidikan (Safarah & Wibowo, 2018). Mulyadi (2020) juga menyoroti bahwa masih ada resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi karena tidak semua wilayah memiliki sekolah dengan standar mutu yang sama. Dalam konteks teori keadilan distributif (Rawls, 1971), kebijakan pendidikan seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan; namun dalam kasus PPDB, justru muncul kesenjangan baru ketika siswa dari keluarga mampu memanipulasi alamat untuk tetap masuk sekolah favorit. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas PPDB belum maksimal dalam menjamin prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluatif dan korektif, termasuk pemerataan kualitas pendidikan, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan, dan sosialisasi kebijakan yang berkelanjutan agar tujuan pemerataan dan keadilan pendidikan benar-benar tercapai.

4. Rekomendasi Kebijakan untuk Perbaikan Sistem PPDB di Kota Surabaya.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan kepada Pemerintah Kota Surabaya (Dinas Pendidikan) untuk mengatasi permasalahan PPDB dan meningkatkan kualitas implementasinya di masa mendatang: (1) Evaluasi komprehensif dan penyesuaian zonasi. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem zonasi saat ini, dengan mempertimbangkan data demografi yang lebih akurat, daya tampung sekolah, dan persebaran kualitas pendidikan. Penyesuaian zona mungkin diperlukan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan mengurangi persaingan yang tidak sehat; (2) Penguatan sistem verifikasi data. Meningkatkan akurasi dan efektivitas sistem verifikasi data calon peserta didik, terutama terkait domisili dan status ekonomi. Kerja

sama dengan instansi terkait (misalnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dinas sosial) perlu ditingkatkan; (3) Peningkatan kuota dan perluasan sasaran afirmasi. Mengkaji kemungkinan peningkatan kuota jalur afirmasi dan memperluas sasaran, misalnya dengan mempertimbangkan anak yatim piatu atau kelompok rentan lainnya; (4) Standardisasi dan transparansi penilaian prestasi. Mengembangkan pedoman yang lebih rinci dan terstandarisasi untuk penilaian prestasi, terutama non-akademik, dengan melibatkan di berbagai bidang. Proses penilaian harus transparan dan akuntabel; (5) Peningkatan komunikasi dan sosialisasi. Melakukan sosialisasi kebijakan PPDB secara lebih intensif dan efektif melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, forum masyarakat, dan melibatkan tokoh masyarakat. Informasi yang jelas dan mudah dipahami sangat penting; (6) Pengembangan sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa. Membangun sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait PPDB yang mudah diakses, responsif, dan transparan; (7) Investasi pada pemerataan kualitas pendidikan. Upaya jangka panjang untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Surabaya harus terus ditingkatkan melalui peningkatan sarana prasarana, kualitas guru, dan program-program unggulan di setiap sekolah; (8) Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal. Memperbaiki dan meningkatkan sistem pendaftaran PPDB daring (online) agar lebih stabil, mudah digunakan, dan aman dari potensi kecurangan. Untuk memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya, diperlukan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menyentuh aspek struktural dan sosial. Pertama, pemerintah daerah perlu memastikan pemerataan kualitas antar sekolah, baik dari segi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun fasilitas pembelajaran.

Hal ini sejalan dengan pandangan UNESCO (2017) bahwa pemerataan akses harus disertai dengan pemerataan mutu agar kebijakan pendidikan inklusif dapat berjalan efektif. Kedua, dibutuhkan sistem verifikasi data domisili yang lebih ketat dan transparan, misalnya dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencegah manipulasi alamat yang kerap terjadi dalam sistem zonasi (Pangaribuan et al., 2019). Ketiga, peningkatan sosialisasi dan literasi kebijakan kepada masyarakat juga penting, agar orang tua dan calon peserta didik memahami tujuan jangka panjang dari sistem zonasi sebagai upaya menciptakan keadilan pendidikan (Mulyadi, 2020). Keempat, penguatan sistem evaluasi dan pengaduan masyarakat secara daring dan luring perlu dilakukan secara berkala agar implementasi PPDB dapat terus disempurnakan sesuai kondisi lapangan (Handayani, 2021). Secara teoritis, rekomendasi ini didukung oleh model kebijakan publik siklus evaluatif (Dunn, 2003) yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis evaluasi berkelanjutan dan partisipasi publik. Dengan demikian, reformasi PPDB di Kota Surabaya harus dibangun atas dasar kolaborasi multi-stakeholder dan pemenuhan prinsip keadilan distributif demi menjamin hak setiap anak atas pendidikan yang layak dan setara.

KESIMPULAN

Permasalahan PPDB di Kota Surabaya merupakan isu multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari desain kebijakan, implementasi di lapangan, hingga kondisi sosial dan demografi kota. Penelitian ini telah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan sistem PPDB yang lebih adil, transparan, dan merata. Rekomendasi kebijakan yang diajukan diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menyempurnakan sistem PPDB dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan berkualitas. Penelitian lebih lanjut dengan fokus pada aspek-aspek spesifik dan melibatkan perspektif yang lebih luas dapat terus memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas isu ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, Rahmawati, Wahid (2019). Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online di SMK Negeri 6 Makassar. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*. Vol. 4 No. 1, 2019 DOI: <https://doi.org/10.26740/jdmp.v4n1.p65-72>
- Ari.I.M.(2018). Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*. Vol. 8 No. 1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v8i1.4930>
- Barnett, J., & Thomas, G. (2009). Methods of Synthesizing Qualitative Research: An Overview. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 20-34.
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*. Basic Books.
- Chikulo, B. C. (2021). Challenges Of Implementing Education Policies In Developing Countries: Insights From Southern Africa. *African Education Review*, 18(3), 245–261. <https://doi.org/10.1080/18146627.2020.1806390>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Cynthia, Rina, Neny(2023). Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam PPDB Tingkat SMP di Kota Semarang Tahun 2022. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 12 No. 2, 2023

- Dar, I. K., & Ernawati, E. (2023). Efektivitas Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Ajaran 2020/2021. *Jurnal Buana*, 7(2), 342-350
- Darmawan, R., Bustomi, T., & Turmudzi, D. (2024). Policy Implementation Model for the Zoning System for Admission of New Students (PPDB) for Basic Education in South Tangerang City. *TEC EMPRESARIAL*, 19(2), 65–75. <https://doi.org/10.1229/tecempresarialjournal.v19i2.507>
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.
- Dwi Hesty Kristyaningrum, Aqib Ardiansyah, Khumiyati Fadilah (2019). Evaluasi Program PPDB Sistem Zonasi di Kabupaten Brebes Menggunakan Model CIPP. *Jurnal Dialektika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*. Volume & Tahun: Vol. 9 No. 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.58436/jdpgsd.v9i2.425>
- Handayani, L. (2021). Evaluating the zoning system policy for student admissions in Indonesia: Equity or inequity? *Journal of Education Policy Research*, 5(4), 233–245.
- Iqbal Faza Ahmad (2021) Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dasar*. Vol. 7 No. 3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.26740/jrpd.v7n3.p129-135>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- Makmur, M. (2023). Evaluasi Sistem Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Zonasi. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 1-10.
- Muammar (2019). Problematika PPDB dengan Sistem Zonasi di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram. *Jurnal: El Midad: Jurnal Jurusan PGMI*. Volume & Tahun: Vol. 11 No. 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i1.1904>

- Mulyadi, T. (2020). Implementing The Zoning System For Student Enrollment In Indonesia: A Critical Analysis. *Indonesian Journal of Educational Policy Studies*, 7(1), 45–57.
- Overton, J., & Müller, K. (2013). A Critical Analysis of the Meta-Study Approach. *Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft*, 42(4), 425–442.
- Pangaribuan, E. N., Hariyati, N., & HAZIN, M. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1).
- Pangaribuan, E. N., Hariyati, N., & Hazin, M. (2019). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1).
- Paterson, B. L., Thorne, S. E., Canam, C., & Jillings, C. (2001). *Meta-Study of Qualitative Health Research: A Practical Guide to Meta-Analysis and Meta-Synthesis*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78-92.
- Putri, Ayunda (2022) Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada PPDB di SMA Negeri 3 Yogyakarta. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. Vol. 11 No. 4, 2022. DOI: <https://doi.org/10.21831/sakp.v11i4.18079>
- Rahmawati, Aullia, Muflhatin (2018). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kediri. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*. Vol. 3 No. 1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p56-61>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 21(2), 206–213.
- Tara Mitha Rizki, Mohammad Ridwan (2023). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan. *Jurnal: Administratio*. Vol. 14 No. 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.408>
- UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Wijayanti & Nurjaman (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*. Vol. 8 No. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22219/jkpp.v8i1.12064>

Yasmin (2023). Penerapan Kebijakan PPDB dengan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Cilacap. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. Vol. 12 No. 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21831/sakp.v12i2.19469>